

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN  
BANTUAN DANA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA  
KEDOKTERAN DI KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA**

Miroslav Donn Wersemetawar  
NPP. 32.1068

*Asdaf Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua*  
*Program Studi Studi Kebijakan Publik*  
Email: [32.1068@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.1068@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Higher education plays a vital role in human resource development and regional progress. However, access to higher education is often hampered by economic factors, especially in remote areas so that this results in obstruction of the education process. Health workers in Sarmi Regency are classified as still very minimal so that competent health workers are needed in this case, one of which is sourced from medical students in Sarmi Regency. Realizing the importance of higher education for regional development, the Sarmi Regency Government initiated a policy of providing educational funding assistance to higher education students/public services. **Purpose:** This study aims to determine the implementation process of providing education funding assistance for medical students in Sarmi Regency, including the distribution mechanism and procedures applied. **Method:** This research uses a Descriptive Qualitative approach. This approach was chosen because the qualitative model provides flexibility for researchers to adjust to the main objectives of the research. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation as well as data triangulation. The main theory used to analyze this topic is Van Meter and Van Horn's implementation theory. There were 9 informants involved in this research. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and also conclusion drawing and verification. The instrument of this research is the author himself. **Result:** The results of the findings regarding the implementation of the policy of providing educational funding assistance for medical students in Sarmi Regency were analyzed through several dimensions, in the dimension of standards and targets of activities seen to have begun to be right on target considering that data collection has been carried out on the number of medical students in Sarmi Regency, in the resource dimension there is still a shortage in terms of budgets that are still less than the target to be achieved, the dimension of communication between implementing agencies has established good communication between implementing stakeholders, the dimension of the characteristics of the implementing agency is still too lame where this policy is still carried out by one field only, the dimension of the socio-economic and political environment shows less than optimal results marked by a very conscious public response, finally the dimension of the attitude of implementers from the Education Office is very good. **Conclusion:** In general, the level of implementation of the policy of providing education funding assistance for medical students in Sarmi Regency has been running optimally, although in some aspects it still needs improvement and improvement, such as in the aspects of communication and resources.

**Keywords:** Government Policy, Scholarship, Medicine, Special Autonomy

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pendidikan tinggi memiliki peran vital dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu daerah . Namun, akses terhadap pendidikan tinggi seringkali terhambat oleh faktor ekonomi, terutama di daerah-daerah

terpencil sehingga ini mengakibatkan terhambatnya proses Pendidikan. Tenaga kesehatan di Kabupaten Sarmi digolongkan masih sangat minim sehingga tenaga Kesehatan yang kompeten sangat dibutuhkan dalam hal ini yang salah satunya bersumber dari mahasiswa Kedokteran di Kabupaten Sarmi. Menyadari pentingnya pendidikan tinggi bagi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sarmi menginisiasi kebijakan pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa perguruan tinggi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi pemberian bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa kedokteran di Kabupaten Sarmi, termasuk mekanisme penyaluran dan prosedur yang diterapkan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena model kualitatif memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk disesuaikan dengan tujuan utama penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi serta triangulasi data. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah Teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 9 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** Hasil temuan mengenai implelementasi kebijakan pemberian bantuan dana Pendidikan untuk mahasiswa kedokteran Kabupaten Sarmi dianalisis melalui beberapa dimensi, pada dimensi standar dan sasaran kegiatan terlihat sudah mulai tepat sasaran mengingat sudah dilakukan pendataan jumlah mahasiswa kedokteran di Kabupaten Sarmi, pada dimensi Sumber daya ditemukan masih adanya kekurangan dalam segi anggaran yang masih kurang dari target yang ingin dicapai, pada dimensi Komunikasi antar badan pelaksana sudah terjalin komunikasi yang baik antar stakeholder pelaksana, pada dimensi karakteristik badan pelaksana masih terlalu timpang dimana kebijakan ini masih diemban oleh satu bidang saja, pada dimensi lingkungan social ekonomi dan politik menunjukkan hasil yang kurang maksimal ditandai dengan respon Masyarakat yang begitu sadar, terakhir pada dimensi sikap pelaksana dari dinas Pendidikan sudah sangat baik. **Kesimpulan:** Secara umum tingkat pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan dana Pendidikan bagi mahasiswa kedokteran di Kabupaten Sarmi ini sudah berjalan dengan optimal meskipun di beberapa aspek masih perlu perbaikan dan peningkatan seperti pada aspek komunikasi dan sumber daya.

**Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Beasiswa, Kedokteran, Otonomi Khusus**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kualitas sebuah negara bergantung pada kualitas sumber daya manusiannya dalam melangsungkan otonomi daerah (Harjito et al., 2024). Sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk memahami dan menguasai ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi. Pendidikan sendiri menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional, dan teknologi, diperlukan sistem pendidikan yang berkualitas (Febrian et al., 2017). Pendidikan sendiri menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar pelaksanaan Pendidikan yang baik.

Pembangunan suatu negara didasarkan pada keberlangsungan Pendidikan dan minimnya angka putus sekolah (Li, 2019). Namun, Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tahun 2022 mengenai jumlah anak yang putus sekolah pada periode 2016 hingga 2021, tercatat bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 75.303 anak yang tidak melanjutkan Pendidikan. Tingkat putus sekolah tertinggi terjadi pada jenjang Sekolah Dasar (SD), dengan jumlah mencapai 38.716 siswa. Sementara itu, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), angka putus sekolah

mengalami peningkatan sebesar 32,20%, yakni sebanyak 15.042 siswa pada tahun 2021, dibandingkan dengan 11.387 siswa pada tahun 2020

**Tabel 1**

| Jenis Kelamin + Jumlah     | Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin |      |               |      |               |       |
|----------------------------|---|------|---------------|------|---------------|-------|
|                            | SD/Sederajat  |      | SMP/Sederajat |      | SMA/Sederajat |       |
|                            | 2022  | 2023 | 2022          | 2023 | 2022          | 2023  |
| <b>Laki-Laki</b>           | 0,80  | 0,68 | 7,77          | 7,97 | 24,56         | 23,78 |
| <b>Perempuan</b>           | 0,62  | 0,66 | 6,06          | 5,86 | 20,35         | 19,34 |
| <b>Laki-Laki+Perempuan</b> | 0,71  | 0,67 | 6,94          | 6,93 | 22,52         | 43,61 |

Sumber : BPS Kabupaten Sarmi Tahun 2024

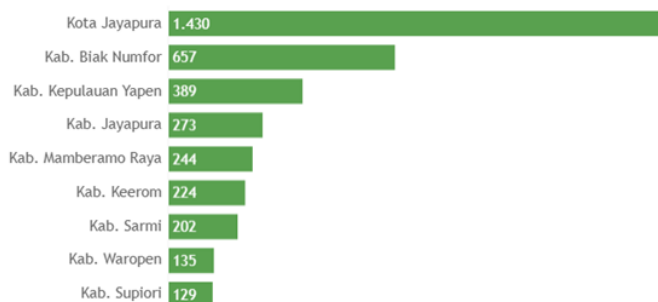
Data ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Labolo, 2022). Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya kondisi ekonomi, letak geografis, dan faktor lainnya yang turut memengaruhi keberlanjutan Pendidikan (Pitono et al., 2023). Beasiswa merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mahasiswa sebagai wujud apresiasi dan dorongan bagi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Pranata et al., 2024).

Pendidikan tinggi memiliki peran vital dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu daerah (Tilbury, 2003). Namun, akses terhadap pendidikan tinggi seringkali terhambat oleh faktor ekonomi, terutama di daerah-daerah terpencil. Salah satunya seperti pada Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Kabupaten Sarmi, dengan luas wilayah sekitar 17.740 km<sup>2</sup> dan populasi yang tersebar di berbagai wilayah. Tahun 2024 dimana Kabupaten Sarmi memiliki jumlah penduduk sebesar 42.601 jiwa dengan jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas dan memiliki kegiatan berupa sekolah sebanyak 2.427 jiwa dan yang menjadi pengangguran dan hanya lulus SMA sebesar 409 Jiwa, menghadapi tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan tinggi (Martínez-Rodríguez & Fernández-Herrería, 2022). Kesenjangan ekonomi dan geografis yang ada membuat banyak pemuda Sarmi kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Terutama pada bidang Pendidikan Kesehatan.

Tenaga kesehatan di Kabupaten Sarmi digolongkan masih sangat minim, menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2024 di dapati bahwa Kabupaten Sarmi menduduki peringkat ke-3 (Tiga) dari bawah dari 9 Kabupaten di Provinsi Papua.

**Gambar 1**

Kabupaten/Kota Tempat Tenaga Kesehatan Non-ASN Bekerja  
Sebaran jumlah 9 tenaga kesehatan prioritas non-ASN di Kabupaten/Kota.



Sumber : Kementerian Kesehatan SDM, 2024

Beasiswa atau dalam bentuk bantuan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Sarmi ini mendanai sekitar 24 Mahasiswa yang berada pada fakultas kedokteran, dengan program studi Kedokteran dan juga Perawat, ada juga yang sedang menjalani masa Koas. Bantuan Pendidikan ini dikhususkan untuk mahasiswa pada fakultas kedokteran dengan program studi kedokteran dikarenakan masih kurangnya dokter di Kabupaten Sarmi. Beasiswa mahasiswa kedokteran ini dikhususkan untuk yang pendidikan dokter dengan maksimal sudah berada pada semester 3 (tiga) dan juga merupakan mahasiswa aktif, selain itu juga dibiayai yang menempuh pendidikan koas, dan pengecualian 2 (dua) siswa dari keperawatan dikarenakan mengambil lanjutan Profesi Ners.

Menyadari pentingnya pendidikan tinggi bagi pembangunan daerah (Corkery, 2004), Pemerintah Kabupaten Sarmi telah menginisiasi kebijakan pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa perguruan tinggi, dalam hal ini pada mahasiswa kedokteran. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemberian bantuan dana pendidikan ini tentu bukan tanpa tantangan. Kondisi geografis Kabupaten Sarmi yang luas dan terpencil, infrastruktur yang terbatas, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan program menjadi hambatan yang perlu diatasi. Di sisi lain, kebijakan ini juga membuka peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sarmi secara signifikan. Dengan adanya bantuan dana pendidikan, diharapkan akan muncul generasi baru lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dan wawasan luas.

Mengingat urgensi dan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa perguruan tinggi di Kabupaten Sarmi menjadi sangat relevan dan penting.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Implementasi kebijakan bantuan dana pendidikan untuk mahasiswa kedokteran di Kabupaten Sarmi, Papua, mungkin menghadapi tantangan dalam hal akses dan distribusi yang merata. Daerah terpencil seperti Sarmi sering mengalami keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi yang dapat menghambat penyaluran bantuan secara efektif. Selain itu, mungkin terdapat kesenjangan antara jumlah penerima bantuan dan kebutuhan aktual di lapangan. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini mengatasi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam menjangkau calon penerima bantuan, serta menganalisis apakah distribusi bantuan telah mencapai sasaran yang tepat dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sarmi.

Meskipun kebijakan pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa kedokteran merupakan langkah positif, perlu dikaji lebih lanjut mengenai keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari program ini. Penelitian dapat menyelidiki apakah terdapat mekanisme untuk memastikan bahwa penerima bantuan kembali ke Kabupaten Sarmi setelah menyelesaikan pendidikan mereka, serta bagaimana program ini berkontribusi pada peningkatan layanan kesehatan di daerah tersebut dalam jangka Panjang (O'Neil et al., 2017). Selain itu, dapat dieksplorasi apakah terdapat strategi untuk mengatasi potensi brain drain, di mana lulusan memilih untuk tidak kembali ke daerah asal mereka setelah menyelesaikan Pendidikan.

Implementasi kebijakan bantuan dana pendidikan untuk mahasiswa kedokteran di Kabupaten Sarmi perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah tersebut. Penelitian dapat mengkaji sejauh mana kebijakan ini telah disesuaikan dengan kondisi kesehatan lokal, pola penyakit endemik, dan tantangan kesehatan masyarakat yang unik di Kabupaten Sarmi.

Perlu dievaluasi apakah program ini telah mempertimbangkan aspek budaya, kearifan lokal, dan preferensi masyarakat setempat dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, dapat diteliti bagaimana kebijakan ini bersinergi dengan program pengembangan sumber daya manusia kesehatan lainnya di tingkat provinsi dan nasional untuk menciptakan sistem kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan di Kabupaten Sarmi.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu yang telah menjadi landasan pemikiran penulis, penelitian pertama karya Kusumajati dan Teguh Kurniawan tahun 2019 dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu, Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Provinsi DKI Jakarta perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran. Selain itu, pelaksana kebijakan perlu memiliki kapabilitas yang memadai dan adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan (Kusumajati & Kurniawan, 2019).

Penelitian karya Yullya Putri Utami tahun 2021 berjudul Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah Untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau, hasil penelitian menyebutkan bahwa yang menjadi kekurangan dalam pemberian beasiswa ini adalah komunikatif dan informasi yang diberikan dari Dinas kepada masyarakat, tetapi dari sisi sarana prasarana, dan staf pendukung semuanya dianggap sudah sangat baik (Utami, 2021).

Penelitian karya Dini Dwi Anggraini, dkk tahun 2024 berjudul Implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang, hasil temuannya yaitu Implementasi ini masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki kedepannya oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga, dikarenakan ada beberapa faktor penghambat dalam mengimplementasikan beasiswa (Anggraini et al., 2024).

Penelitian karya Linda Wulandari dkk tahun 2025 berjudul Implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro dengan hasil bahwa Kabupaten Bojonegoro sudah menerapkan beasiswa sesuai dengan Perbup 17 Tahun 2023, walau masih dengan sedikit kendala tetapi program ini membantu Index Pertumbuhan Manusia (Wulandari et al., 2025).

Penelitian karya Nuryanuarifa, dkk tahun 2024 tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Studi Pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 149 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Atau Kurang Mampu) dengan hasil bahwa implementasi tersebut sudah sesuai dengan Perbup Blitar No 149 Tahun 2022, yang menjadi penghambat ialah komunikasi yang dilakukan dan sumber daya manusianya yang masih belum matang (Nuryanuarifa et al., 2024).

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam mengkaji implementasi kebijakan bantuan dana pendidikan untuk mahasiswa kedokteran di Kabupaten Sarmi, Papua, dengan fokus pada dampak jangka panjang terhadap layanan kesehatan di daerah terpencil dan adaptasi kebijakan terhadap kebutuhan lokal. Menggunakan pendekatan holistik yang menggabungkan analisis kebijakan publik, kesehatan masyarakat, dan pembangunan daerah, studi ini mengisi kesenjangan dalam literatur tentang pengembangan SDM kesehatan di daerah terpencil Indonesia. Tawaran kebaruan terkait perspektif jangka Panjang yang belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu menjadikan penelitian ini sangat segar untuk dibahas dan dikembangkan.

## **1.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Implementasi Pemberian Bantuan Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Kedokteran Di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk melihat secara dalam dan terperinci terkait implementasi dari program bantuan dana Pendidikan untuk mahasiswa kedokteran di Kabupaten Sarmi. Pendekatan ini dipilih karena topik ini lebih mengarah pada pembahasan secara mendalam berbentuk rangkaian deskriptif sehingga pendekatan ini lebih baik untuk digunakan (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, studi dokumen dan juga wawancara terhadap informan yang telah dipilih. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada subjek yang terlibat langsung atau dalam lingkup kebijakan bantuan dana Pendidikan kepada mahasiswa kedokteran, sehingga informan dipilih dengan tujuan tertentu. Adapun informan yang dipakai sejumlah 9 informan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Bupati Sarmi dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi, informan kunci merupakan informan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam pada topik tertentu yang menjadi pembahasan (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilangsungkan melalui reduksi data yang berserak dilapangan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Adapun penelitian ini berlangsung kurang lebih satu bulan di bulan Januari 2025 berlokasi di lingkup Kabupaten Sarmi, terkhusus pengamatan langsung di lokus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

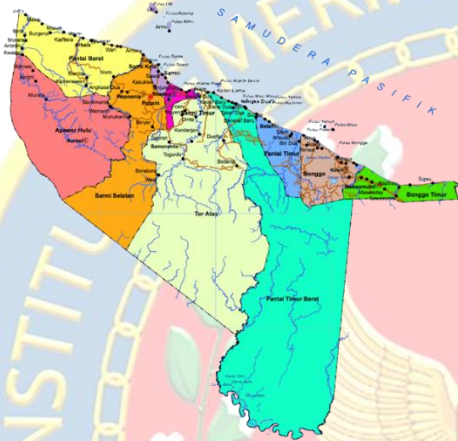
Implementasi kebijakan publik merupakan proses krusial yang menentukan keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa kedokteran di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Teori ini menekankan enam variabel utama yang saling berinteraksi dalam proses implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, politik dan dibahas sebagai berikut :

### **3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan**

Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa kedokteran di Kabupaten Sarmi telah menetapkan standar dan sasaran yang terstruktur, terutama dalam memprioritaskan penerima bantuan sebagai Orang Asli Papua (OAP) atau mahasiswa yang lahir dan besar di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk memberdayakan masyarakat asli Papua. Namun, kriteria untuk penerima non-OAP yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) masih belum jelas, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses seleksi. Syarat administratif seperti surat aktif kuliah, transkrip nilai, dan pakta integritas telah diterapkan untuk memastikan akuntabilitas, tetapi kompleksitas prosedur justru menjadi penghambat. Misalnya, mahasiswa diwajibkan

memiliki rekening Bank Papua, yang tidak mudah diakses bagi mereka yang berkuliah di luar Papua, seperti di Jawa atau kota besar lainnya. Selain itu, ketiadaan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum formal menyebabkan inkonsistensi kebijakan, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan. Peneliti menemukan bahwa meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan lokal, sosialisasi mengenai syarat dan mekanisme penerimaan masih minim, sehingga partisipasi masyarakat tetap rendah. Di sisi lain, penetapan batas waktu studi (4,5 tahun) dan konsekuensi bagi mahasiswa yang tidak menyelesaikan studi dinilai efektif untuk memacu disiplin akademik. Namun, evaluasi terhadap keberlanjutan program ini belum dilakukan secara berkala, sehingga dampak jangka panjangnya belum terukur. Dengan demikian, meskipun standar dan sasaran kebijakan telah dirancang dengan baik, implementasinya masih perlu didukung oleh regulasi yang lebih kuat dan prosedur yang lebih adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa

Gambar



Sumber : Bappeda Kabupaten Sarmi 2024

Kabupaten Sarmi merupakan kabupaten yang bisa terbilang baru, sebelumnya Sarmi merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Jayapura tetapi sejak 11 Desember 2002 resmi Sarmi menjadi kabupaten yang dinamakan Kabupaten Sarmi dengan dasar hukum UU No. 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi dan beberapa kabupaten di Papua. Ditahun 2017 tercatat bahwa penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Sarmi mencapai 13,75 persen, kondisi ini kemudian mengalami peningkatan ditahun 2018 hingga mencapai 14,51 persen. Kemudian ditahun 2019 penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Sarmi mengalami penurunan menjadi 14,41 persen. Kondisi penurunan ini terus terjadi hingga mencapai 13,84 persen ditahun 2021

### 3.2 Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan ini melibatkan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi. Namun, keterbatasan SDM internal, seperti beban kerja berlebih pada Kasubag Program dan Keuangan, mengurangi kapasitas pengawasan dan evaluasi program. Staf yang bertanggung jawab seringkali tidak memiliki pelatihan khusus dalam mengelola administrasi beasiswa berbasis kebutuhan spesifik mahasiswa kedokteran, sehingga terjadi ketidakakuratan dalam pendataan penerima manfaat. Dari sisi keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar untuk 24 mahasiswa dinilai belum memadai, mengingat biaya kuliah kedokteran yang terus mengalami inflasi.

Meskipun dana Otsus dan DAU dialokasikan secara terpisah untuk OAP dan non-OAP, fleksibilitas dalam menanggung biaya tambahan seperti transportasi praktek atau kenaikan biaya stase masih sangat terbatas. Mahasiswa juga mengeluhkan keterlambatan pencairan dana akibat lamanya proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang kerap mengganggu kelangsungan pembayaran

perkuliahan. Selain itu, tidak adanya mekanisme penyesuaian anggaran tahunan berdasarkan kenaikan biaya pendidikan membuat mahasiswa harus mencari sumber dana tambahan secara mandiri. Di sisi lain, meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan lokal, alokasi dana belum sepenuhnya menjangkau mahasiswa dari keluarga miskin akibat syarat administratif yang rumit. Peneliti juga menemukan bahwa koordinasi antar dinas dalam mengelola anggaran masih kurang transparan, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pencatatan keuangan. Dengan demikian, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta revisi alokasi anggaran yang realistis, menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas program ini.

### **3.3 Komunikasi Antar Badan Pelaksana**

Karakteristik pelaksana kebijakan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, menunjukkan komitmen positif dalam meningkatkan SDM kesehatan melalui program beasiswa. Sikap proaktif Bupati periode 2017-2022 tercermin dari pernyataan visi jangka panjang, seperti "*Kita harus meletakkan fondasi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat*". Namun, komitmen ini belum diimbangi dengan kebijakan pendukung, seperti penyediaan layanan administratif yang ramah mahasiswa atau pelatihan teknis bagi staf. Tanggapan pemerintah terhadap kendala teknis, seperti kesulitan pembuatan rekening Bank Papua, dinilai lamban dan kurang solutif. Misalnya, belum ada upaya konkret untuk bekerja sama dengan bank nasional atau menyederhanakan prosedur pelaporan penggunaan dana. Selain itu, meskipun Kasubag Program dan Keuangan memegang peran sentral dalam pengelolaan anggaran, beban kerja yang terlalu berat menyebabkan proses administrasi seringkali tertunda. Peneliti juga menemukan bahwa kurangnya sinergi antara dinas terkait dalam memantau perkembangan akademik mahasiswa menyebabkan data penerima manfaat tidak terupdate secara berkala. Di sisi lain, meskipun program ini dianggap sebagai bentuk investasi SDM, kurangnya insentif bagi pelaksana untuk meningkatkan kinerja menjadi faktor penghambat. Dengan demikian, karakteristik pelaksana yang baik perlu didukung oleh sistem reward and punishment, peningkatan kapasitas SDM, dan inovasi dalam penyelesaian masalah teknis.

### **3.4 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Lingkungan sosial di Kabupaten Sarmi ditandai dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi, terutama di bidang kedokteran. Angka putus sekolah yang tinggi dan minimnya motivasi untuk melanjutkan studi menjadi tantangan utama program ini. Secara ekonomi, fluktuasi angka kemiskinan (5,23 ribu jiwa pada 2017 menjadi 5,56 ribu jiwa pada 2021) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kategori "*sedang*" (63,94 poin pada 2021) mencerminkan keterbatasan daya beli masyarakat. Program beasiswa belum sepenuhnya menjangkau keluarga miskin karena syarat administratif yang kompleks, seperti kepemilikan dokumen resmi atau rekening bank.

Dari sisi politik, visi Bupati periode 2017-2022 yang berfokus pada peningkatan SDM turut memengaruhi prioritas anggaran, tetapi perubahan kepemimpinan berpotensi menggeser fokus kebijakan. Ketiadaan Perbup sebagai landasan hukum membuat program ini rentan terhadap perubahan kebijakan, terutama jika terjadi pergantian kepala daerah. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Sarmi yang terpencil dan minimnya infrastruktur pendidikan turut memengaruhi partisipasi masyarakat. Peneliti juga mencatat bahwa tekanan politik untuk menampilkan hasil cepat seringkali mengabaikan evaluasi mendalam terhadap dampak program. Dengan demikian, keberlanjutan kebijakan ini memerlukan pendekatan holistik yang memperhatikan konteks sosial-ekonomi, penguatan regulasi, dan peningkatan infrastruktur pendukung.

### **3.5 Disposisi Implementor**

Secara umum, kebijakan pemberian bantuan dana pendidikan telah berhasil meringankan beban finansial mahasiswa kedokteran di Kabupaten Sarmi. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti ketiadaan Perbup yang mengakibatkan inkonsistensi regulasi. Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan inflasi biaya pendidikan juga menjadi masalah, terutama bagi mahasiswa yang menghadapi kenaikan biaya stase atau kebutuhan tambahan selama koas. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal menyebabkan tumpang tindih data dan lambatnya penanganan keluhan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat akibat minimnya sosialisasi membuat program ini belum mencapai target peningkatan jumlah tenaga kesehatan lokal. Evaluasi terhadap dampak jangka panjang, seperti kontribusi lulusan terhadap sistem kesehatan daerah, juga belum dilakukan secara sistematis.

Untuk meningkatkan keberlanjutan, diperlukan revisi kebijakan yang mencakup peningkatan alokasi dana, penyederhanaan prosedur administratif, dan penguatan kerangka hukum melalui Perbup. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga keuangan diperlukan untuk memitigasi kendala teknis, seperti pembukaan rekening atau pelaporan keuangan. Dengan demikian, program ini dapat menjadi model kebijakan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan SDM kesehatan di Kabupaten Sarmi.

### **3.6 Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana merupakan salah satu faktor penting juga, menurut Van Meter Dan Van Horn pada tahun 2006 “Penerimaan maupun penolakan dari pelaksana kebijakan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, dikarenakan mempengaruhi kegagalan ataupun keberhasilan sebuah implementasi publik dari kebijakan yang diambil”. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa sikap pelaksana dari yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah sangat baik, sikap pelaksana yang dimaksudkan adalah koordinasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Dinas Kesehatan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan juga agar Kabupaten Sarmi memiliki Dokter yang berasal dari Sarmi atau bahkan adalah anak Sarmi.

### **3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan penelitian mengenai implementasi kebijakan pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa kedokteran di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, mengungkapkan adanya kendala signifikan dalam aspek sumber daya, khususnya terkait anggaran. Data menunjukkan bahwa alokasi dana yang tersedia masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program secara optimal. Kekurangan anggaran ini berdampak pada terbatasnya jumlah mahasiswa yang dapat dibantu dan besaran bantuan yang dapat diberikan. Hal ini mengindikasikan perlunya peninjauan ulang terhadap perencanaan anggaran dan upaya untuk mengoptimalkan sumber pendanaan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program bantuan pendidikan ini. Hasil ini sama halnya dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa masalah anggaran menjadi masalah utama peningkatan bantuan Pendidikan siswa sekolah menengah di Jakarta (Ramadhan & Sugiyono, 2015).

Dalam aspek karakteristik badan pelaksana, penelitian mengungkapkan adanya ketimpangan struktural yang signifikan. Temuan menunjukkan bahwa tanggung jawab implementasi kebijakan ini masih terpusat pada satu bidang saja, yaitu Kasubag Program di Dinas Pendidikan Kabupaten Sarmi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beban kerja yang tidak proporsional dan dapat mempengaruhi efisiensi pelaksanaan program. Keterbatasan ini juga dapat berdampak pada kurangnya perspektif yang beragam dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga diperlukan pertimbangan untuk melibatkan lebih banyak

unit atau bidang dalam implementasi program ini. Hasil ini sama halnya dengan penelitian di dinas Satpol PPCirebon (Fitra & Nurasa, 2025).

Meskipun terdapat tantangan dalam aspek sumber daya dan karakteristik badan pelaksana, penelitian menemukan bahwa aspek sikap pelaksana telah berjalan dengan baik. Data menunjukkan bahwa prioritas utama program ini ditujukan untuk Orang Asli Papua (OAP), sesuai dengan tujuan awal kebijakan. Sikap positif dan komitmen pelaksana dalam mengutamakan OAP sebagai penerima manfaat utama mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya program ini dalam konteks pembangunan sumber daya manusia di bidang kesehatan di Kabupaten Sarmi. Temuan ini menggambarkan potensi keberhasilan program dalam jangka panjang, terutama dalam upaya meningkatkan jumlah tenaga medis dari kalangan OAP di wilayah tersebut. Hal ini sama halnya dengan pemrioritasan OAP pada rekrutmen polisi di Papua (Sukarnito & Aedah, 2021)

### 3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik juga terbahas dalam penelitian ini dimana beberapa kendala menjadi perhatian dalam memaksimalkan implementasi program ini, Adapun kendalanya terkait dengan keterlambatan pembayaran biaya pendidikan di karenakan Dinas harus menunggu di tetapkan dan di keluarkannya DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun berjalan agar bisa dilakukan permintaan dana, Kendala lain yang dihadapi adalah mahasiswa harus memiliki rekening Bank Papua, sehingga adapun mahasiswa yang belum memiliki rekening Bank Papua harus membuat rekening terlebih dahulu, Kendala lain yang ditemukan peneliti adalah jumlah anggaran, dikarenakan anggaran yang terbatas.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan implementasi kebijakan bantuan dana Pendidikan untuk mahasiswa kedokteran di Kabupaten Sarmi dapat ditarik Kesimpulan bahwa pelaksanaan program ini secara umum sudah optimal namun dengan beberapa catatan, hal tersebut berkenaan dengan beberapa dimensi yang masih belum optimal.

**Keterbatasan Penelitian.** Karya ini penulis sadari masih banyak kekurangan yang terjadi, hal ini tidak lepas dari beberapa keterbatasan penelitian seperti keterbatasan akses Lokasi yang masih sulit untuk dijangkau sehingga penelitian ini menjadi terhambat, keterbatasan lama waktu penelitian juga menjadi tantangan tersendiri mengingat penelitian ini hanya dilakukan kurang dari satu bulan, keterbatasan lain adalah terkait informan yang terjaring dirasa masih belum selesai atau mencapai snowball mengingat penelitian ini harus selesai karena keterbatasan waktu.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna untuk arah kedepan pengamatan dapat dilakukan dengan melihat evaluasi kebijakan ini, dimana meskipun implementasinya sudah baik namun baik disini masih bersifat abstrak. Sehingga diharapkan penelitian terkait evaluasi program dapat dilakukan

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang dan bimbingan tanpa batas. Penghargaan setinggi-tingginya juga penulis haturkan kepada jajaran pimpinan IPDN beserta seluruh dosen yang telah membagikan ilmu yang tak ternilai harganya. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Djohermansyah Djohan atas bimbingan yang penuh

dedikasi dan kebijaksanaan selama proses penelitian ini. Tak luput dari ingatan, penulis juga berterima kasih kepada semua sahabat yang telah berkontribusi dalam pembentukan karakter penulis.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. D., Hanani, R., & ... (2024). Implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy* .... <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/43737%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/43737/30919>
- Corkery, L. (2004). *Community Gardens as a Platform for Education for Sustainability*. 20(1), 69–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0814062600002317>
- Febrian, R. A., Suwaryo, U., Kartini, D. S., & Teguh, P. (2017). Development of Technopolitan Region in Pelalawan Regency of Riau Province in Collaborative Governance Perspective. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 163(Icodag), 87–91. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.18>
- Fitra, F. F., & Nurasa, H. (2025). PENGUATAN SATPOL PP KOTA CIREBON : STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(2), 211–220. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jtkp/article/view/40397/16852>
- Harjito, B., Djohan, D., Achmad, M., & Teguh, P. (2024). PEMERATAAN PEMBANGUNAN ( Studi Kasus Di Provinsi Papua Barat Daya ). *Jurnal Kajian Riset Multidisiplin*, 8(12), 25–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.58471/ju-sosak.v1i01.137>
- Kusumajati, & Kurniawan, T. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 166–176. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2608http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Labolo, M. (2022). The Role of Political Parties in Providing Political Education Among Gen Z. *Journal of Government Science and Rural Development*, 3(September), 271–280.
- Li, C. (2019). Education for Sustainable Development: Global Progress and China's Experience. *Chinese Journal of Urban and Environmental Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.1142/S2345748119400013>
- Martínez-Rodríguez, F. M., & Fernández-Herrería, A. (2022). Huerto Alegre: an ecocentric socio-educational experience as a critical practice of education for sustainable development. *Australian Journal of Environmental Education*, 38(2), 138–151. <https://doi.org/10.1017/aee.2021.8>
- Nuryanuarifa, D., Maharani, W. M., & Lailin, U. R. (2024). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jmpb-widyakarya.v2i2.3296>
- O'Neil, C. A., Kim, L., Prill, M. M., Stone, N. D., Garg, S., Talbot, H. K., & Babcock, H. M. (2017). Preventing Respiratory Viral Transmission in Long-Term Care: Knowledge, Attitudes, and Practices of Healthcare Personnel. *Infection Control and Hospital Epidemiology*, 38(12), 1449–1456. <https://doi.org/10.1017/ice.2017.232>
- Pitono, A., Harahap, A. S., Kartiwi, K., & Baidhowah, A. R. (2023). Informal Institutions, Government Regulatory Functions, and Development of Governance Studies. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 16(2), 107–123. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i2.3746>
- Pranata, R. tri H., Budiarto, T., Basar, F. M., & Bachtiar, W. (2024). SEKOLAH TANGGUH PANGAN DAN PERTANIAN: EDUKASI PERTANIAN TERPADU DAN KEAMANAN PANGAN DI SEKOLAH SEMAI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(7), 1–23. <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>
- Ramadhan, M. A., & Sugiyono, S. (2015). Pengembangan Sumber Dana Sekolah Pada Sekolah

- Menengah Kejuruan. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 5(3), 340.  
<https://doi.org/10.21831/jpv.v5i3.6488>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274.  
<http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Sukarnito, C., & Aedah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Propinsi Papua Dalam Rekrutmen Brigadir Polisi Republik Indonesia (Polri) Di Polda Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1), 34–42. <https://doi.org/10.31957/jkp.v4i1.1652>
- Tilbury, D. (2003). The World Summit, Sustainable Development and Environmental Education. *Australian Journal Of Environmental Education*, 19, 109–113.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0814062600001518>
- Utami, Y. P. (2021). Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah Untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2285>
- Wulandari, L., Kasiemi, S., Subandi, E., & Tjatur, K. (2025). Implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)*, 9(1), 39–45.  
<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JIAN%0AImplementasi>

